

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Adanya perubahan lingkungan global yang semakin menyatukan hampir seluruh negara di dunia dalam komunitas tunggal, yang dijumpai perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin murah, menuntut adanya transparansi di segala bidang. Standar akuntansi keuangan yang berkualitas merupakan salah satu prasarana penting untuk mewujudkan transparansi tersebut. Oleh karena itu Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) mengadopsi standar akuntansi domestik kearah *International Financial Reporting Standard (IFRS)*.

Mengadopsi IFRS dalam standar akuntansi keuangan Indonesia berarti laporan keuangan berbicara dengan bahasa akuntansi yang sama, sehingga memudahkan perusahaan multinasional, dalam hal ini perusahaan *multifinance* berkomunikasi dengan cabang-cabang perusahaannya yang berada dalam negara yang berbeda kemudian meningkatkan kualitas pelaporan manajemen dan pengambilan keputusan. Lebih dari pada itu untuk meningkatkan kepastian dan konsistensi dalam interpretasi akuntansi, sehingga memudahkan proses akuisisi dan divestasi. Kinerja perusahaan dapat diperbandingkan dengan pesaing lainnya secara global, apalagi dengan semakin meningkatnya persaingan global saat ini akan menjadi suatu kelemahan bagi suatu perusahaan jika tidak dapat diperbandingkan secara global, yang berarti kurang mampu dalam menarik modal

dan menghasilkan keuntungan di masa depan. Standar akuntansi keuangan dapat diibaratkan sebagai sebuah cermin, di mana cermin yang baik akan mampu menggambarkan kondisi praktis bisnis yang sebenarnya. DSAK menetapkan PSAK 50 tentang instrumen keuangan atas penyajian instrumen keuangan dengan mengadopsi IAS 32 yang telah disahkan pada tanggal 29 april 2014. Sedangkan PSAK 55 tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan dengan mengadopsi IAS 39. PSAK 50 dan PSAK 55 yang telah di harmonisasi IAS (*International Accounting Standard*), efektif tanggal pemberlakuannya 1 januari 2015. Kedua PSAK tersebut yang mengatur perlakuan terhadap nilai wajar dari instrumen keuangan.

Satu-satunya yang menopang pertumbuhan ekonomi saat ini adalah pembiayaan konsumen yang meliputi sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit dan atau pembiayaan konsumen seperti kredit mobil yang merupakan aktivitas dari perusahaan *multifinance*, yang didorong oleh realisasi pertumbuhan sektor infrastruktur dan belanja pemerintah, termasuk juga dampak dari penurunan bunga acuan. Total pembiayaan yang disalurkan industri mencapai Rp364,40 triliun pada akhir tahun 2015. Pada akhir tahun 2016 nilai pembiayaan/penyertaan perusahaan modal ventura konvensional tercatat sebesar Rp8,14 triliun. Jumlah pembiayaan/penyertaan terbesar adalah pembiayaan bagi hasil dengan nilai sebesar Rp5,63 triliun atau 69,12% tahun 2016. Beberapa industri yang menjadi sektor produktif prioritas antara lain pembiayaan perumahan, ekonomi kreatif, pertanian, maritim, infrastruktur, pariwisata dan energi terbaru. Total aset perusahaan pembiayaan sebesar Rp 442,77 triliun

(86,76%). Sampai dengan saat ini telah banyak perusahaan pembiayaan yang modal disetornya dibawah ketentuan minimum tersebut mulai terpacu dalam meningkatkan modalnya untuk bersaing dan bersiap diri menghadapi guncangan-guncangan krisis ekonomi yang mungkin terjadi dimasa datang. Selain itu, perusahaan *multifinance* juga diwajibkan memiliki rasio pinjaman terhadap modal sendiri (*gearing ratio*) maksimal sebesar 10 kali dari rasio piutang pembiayaan terhadap total aset (*investment aset ratio*) minimal sebesar 40% (Statistik Lembaga Pembiayaan 2016 diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia Finance Institutions Statistics 2016 Published by Indonesia Financial Services Authority, 2016).

Permasalahan pengakuan, pengukuran serta penyajian saling terkait satu sama lain dalam laporan keuangan perusahaan yang harus memberikan tiga pengungkapan yakni, perubahan dalam kredit macet, kerugian pinjaman dan penurunan nilai pinjaman. Perlakuan akuntansi atas instrumen keuangan sesuai PSAK yang ditetapkan DSAK adalah PSAK 50 dan PSAK 55, dalam hal ini perusahaan *multifinance* terhadap manajemen resiko kredit sangat melekat permasalahan dalam menghitung aset keuangan dan liabilitas keuangannya. Risiko kredit merupakan risiko utama karena perusahaan bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen, dimana perusahaan menawarkan jasa pembiayaan bagi masyarakat yang hendak memiliki kendaraan bermotor secara langsung, Perusahaan menghadapi risiko seandainya konsumen tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara konsumen dan perusahaan. Oleh karena itu, penulis meneliti bagaimana penerapan PSAK 50 dan

55 pada perusahaan *multifinance* dalam perlakuan akuntansi nilai wajar terhadap instrumen keuangan pada piutang pembiayaan konsumen. PSAK 50 yang meliputi penyajian atas liabilitas dan ekuitas yakni penerbit instrumen keuangan pada saat pengakuan awal mengklasifikasikan instrumen tersebut atau komponennya sebagai liabilitas keuangan, aset keuangan, atau instrumen ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan, dan instrumen ekuitas. Tujuan PSAK 50 ini adalah untuk menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan (PSAK-50-Instrumen-Kuangan-Penyajian:03).

PSAK 55 yang mengatur instrumen keuangan tentang pengakuan dan pengukuran aset keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman yang diberikan atau piutang dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Tujuan PSAK 55 adalah mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan, dan kontrak pembelian atau penjualan *item* non keuangan. Pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan, dan kontrak pembelian atau penjualan *item* non keuangan berdasarkan nilai wajar, atas dasar itu laporan keuangan harus menyajikan hasil transaksi dan memberikan informasi yang benar tentang posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas (IAI, 2016: PSAK 55).

Pengertian dari perusahaan pembiayaan (*multifinance*) diatur dalam peraturan menteri keuangan no. 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan *multifinance*, dalam pasal 1 huruf (b) adalah badan usaha di luar bank dan

lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan pembiayaan. Hal yang cukup krusial dari PSAK 50 dan PSAK 55 bagi perusahaan *multifinance* adalah bahwa piutang pembiayaan sebagai aset keuangan perusahaan digolongkan pada *loan and receivable* yang valuasinya adalah nilai penyusutan (*amortized cost*). Hal ini membawa konsekuensi bahwa nilai piutang pembiayaan pada perusahaan *multifinance* akan dipengaruhi oleh proyeksi *cashflow* dari aset tersebut sehingga kredit yang dikenakan bunga dibawah bunga pasar akan terdiskon menjadi lebih kecil dari harga perolehannya. Perhitungan penurunan nilai aset keuangan yang signifikan tetapi secara individual tidak mengalami penurunan nilai. Jadi, kredit yang kualitasnya baik yaitu kelancaran pembayaran dan prospek usaha dinilai baik akan memperkecil jumlah penurunan nilai, sementara disisi lain kredit yang kualitasnya kurang baik akan menjadi semakin besar penurunan nilainya.

Menurut J.R. Wondal (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa nilai piutang pembiayaan pada perusahaan *multifinance* akan dipengaruhi oleh proyeksi *cashflow* dari aset tersebut, sehingga kredit yang dikenakan bunga dibawah bunga pasar akan terdiskon menjadi lebih kecil dari harga perolehannya (kredit yang dikururkan). Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa perusahaan *multifinance* (PT. Clipan Finance Indonesia Tbk.) telah menerapkan PSAK 50 dan PSAK 55 dalam penyajian laporan keuangannya yang membuat perusahaan lebih informatif, wajar dan lengkap dalam hal penyajiannya. Disimpulkan juga dalam pengukuran beban cadangan kerugian nilai piutang pada nilai wajar berpengaruh pada kenaikan persentase kenaikan laba bersih (Wondal, Saerang, & Tirajoh, 2015:

123). Emmanuela (2012) dalam penelitiannya dengan sampel 10 laporan keuangan perusahaan *multifinance* yang *listed* di Bursa Efek Indonesia menggambarkan bagaimana pengungkapan penurunan nilai piutang pembiayaan pada perusahaan *multifinance* sebelum dan setelah berlakunya PSAK 50 dan PSAK 55 dalam laporan keuangan pada kenaikan persentase penurunan nilai piutang. Hasil dari penelitiannya disimpulkan bahwa perusahaan yang telah menerapkan PSAK 55 pada perhitungan cadangan penurunan piutang dan membebankannya pada saldo laba yang mutasinya dapat dilihat pada laporan perubahan ekuitas. Penelitian ini menganalisa bagaimana PSAK 50 dan PSAK 55 dalam penerapannya keseluruhan mempengaruhi penurunan nilai aset dan liabilitas perusahaan. (Emmanuela, 2012: 66)

Penulis akan membandingkan bagaimana pengungkapan penurunan nilai piutang pembiayaan konsumen pada laporan keuangan awal penerapan PSAK 50 dan PSAK 55 (laporan keuangan tahun 2011) dan setelah menerapkan PSAK 50 dan 55 (Laporan keuangan tahun 2016). Apakah ada kenaikan/ penurunan persentase yang signifikan dalam hal pengungkapan penurunan nilai piutang pembiayaan pada perusahaan *multifinance* yang *listed* di BEI.

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan mengenai bagaimana penerapan PSAK 50 dan PSAK 55 tentang instrumen keuangan terhadap penyajian, pengakuan dan pengukuran aset keuangan perusahaan *multifinance* yang *listed* di Bursa Efek Indonesia (BEI). Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **ANALISIS PENERAPAN PSAK 50 DAN PSAK 55 PADA PERUSAHAAN MULTIFINANCE DI BEI.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Penerapan PSAK 50 dan PSAK 55 merupakan perlakuan akuntansi untuk instrumen keuangan yang membuat beberapa perubahan yang cukup signifikan, khususnya memberikan porsi lebih pada akuntansi nilai wajar (*fair value accounting*)
2. Perusahaan *multifinance* yang *listed* di Bursa Efek Indonesia sudah menerapkan PSAK 50 dan PSAK 55 untuk penurunan nilai aset keuangan dalam piutang pembiayaan terhadap laporan keuangan sehingga meningkatkan relevansi dan reliabilitas laporan keuangan.
3. Penerapan PSAK 50 dan PSAK 55 berdampak pada kinerja perusahaan *multifinance*.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini merupakan analisa laporan keuangan perusahaan *multifinance* yang terdaftar di Bursa efek Indonesia (BEI) yang sudah menerapkan PSAK 50 dan PSAK 55. Atas keterbatasan data dan waktu yang penulis miliki maka penulis membatasi masalah. Penelitian yang dilakukan mencakup pembahasan mengenai penyajian, pengakuan dan pengukuran penurunan nilai atas piutang pada perusahaan *multifinance* dalam mengestimasi penurunan nilai piutang dan pendekatan nilai wajar pada akun CKPN yang kemudian akan disajikan dalam laporan keuangan. Penulis mengumpulkan informasi dan data sekunder, seperti laporan keuangan perusahaan (*financial statement*), laporan tahunan (*annual*

report), laporan audit (*audited report*) serta informasi lainnya atas perusahaan *multifinance* laporan keuangan yang diaudit tahun 2011 sejak diterapkan PSAK 50 dan PSAK 55 dan laporan keuangan yang diaudit tahun 2016 sesudah diberlakukan semuanya PSAK 50 dan PSAK 55 yang *listed* di BEI, kemudian melakukan penelitian yang meliputi metode perhitungan pengakuan, pengukuran dan penyajian dan dampak yang timbul akibat penerapan PSAK 50 dan PSAK 55 karena adanya penurunan nilai aset keuangan dari CKPN. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pembatasan masalah di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan PSAK 50 dan PSAK 55 memberikan pengaruh signifikan terhadap perhitungan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas dari pengakuan dan pengukuran dan penyajian penurunan nilai piutang perusahaan *multifinance*?
2. Apakah perusahaan *multifinance* yang *listed* di Bursa Efek Indonesia sudah menerapkan PSAK 50 dan PSAK 55 secara keseluruhan?
3. Bagaimana dampak yang timbul akibat penurunan nilai aset keuangan perusahaan hasil dari penerapan PSAK 50 dan PSAK 55 bagi kinerja perusahaan?
4. Bagaimana perbandingan laporan keuangan tahun 2011 dan laporan keuangan tahun 2016 pada perusahaan *multifinance* yang sudah menerapkan PSAK 50 dan PSAK 55 dalam menghitung penurunan nilai aset keuangan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perhitungan nilai wajar terhadap aset keuangan pada akun piutang pembiayaan konsumen perusahaan *multifinance* sebagai hasil dari penerapan PSAK 50 dan PSAK 55.
2. Untuk mengetahui penerapan PSAK 50 dan PSAK 55 pada perusahaan *multifinance* yang *listed* di Bursa Efek Indonesia secara umum.
3. Penerapan PSAK 50 dan PSAK 55 pada perusahaan *multifinance* dilihat dari pengakuan, pengukuran serta penyajian penurunan nilai piutang bagi kinerja perusahaan.
4. Memberikan perbandingan penerapan PSAK 50 dan PSAK 55 pada laporan keuangan tahun 2011 dan tahun 2016 perusahaan *mutifinance* yang *listed* di Bursa Efek Indonesia dalam menghitung penurunan nilai piutang pembiayaan konsumen.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka diharapkan manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis

Dapat menambah pengetahuan yang lebih luas mengenai Standar Akuntansi Keuangan PSAK 50 atas penyajian dan PSAK 55 atas pengukuran dan pengakuan instrumen keuangan (Efektif per 1 Januari 2015). Selain itu juga sebagai bentuk penerapan teori yang pernah dipelajari selama perkuliahan.

2. Dunia Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan karya ilmiah maupun tugas akhir dan dapat membantu memastikan penempatan unsur-unsur atau elemen data ekonomi ditempatkan pada posisi yang tepat agar semua data ekonomi dapat tersaji dengan baik, dapat menambah pemahaman PSAK 50 dan PSAK 55 tentang penyajian, pengukuran dan pengungkapan atas instrumen keuangan (efektif per 1 Januari 2015), memperkuat hasil penelitian sebelumnya serta menambah khasanah kepustakaan khususnya di Fakultas ekonomi Universitas Putera Batam.

1.6.2 Manfaat Praktis

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka, manfaat praktis ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Bagi Bursa Efek Indonesia (BEI)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Bursa Efek Indonesia untuk kepentingan *trading* perusahaan *multifinance* penyelenggaraan akuntabilitas yang baik.

2. Bagi Investor

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan serta referensi bagi pihak investor untuk mengambil keputusan dalam menanamkan dananya pada sebuah badan usaha ataupun perusahaan.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan penilaian bagi masyarakat untuk menilai manfaat atas aktivitas perusahaan *multifinance* untuk membantu kelancaran perekonomian.

4. Bagi Peneliti Berikutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi pengembangan ilmu mengenai analisis.